

The Relationship between Civil Society Organization and Political Party in Legislative Election: The Case of of Fatayat and PKB in Indonesia

JISPO
Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
2022, Vol. 12, No. 1: 105-126
[https://journal.uinsgd.ac.id/
index.php/jispo/index](https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index)
© The Author(s) 2022

M. Anas Mahfudhi*

Universitas Indonesia, Indonesia

Aditya Perdana

Universitas Indonesia, Indonesia

Abstrak

This article aims to analyze the political strategies of Fatayat as a civil society organization to win women candidates in the 2019 legislative elections. To do so, it uses two concepts of Gwendolyn Bevis's theory of civil society and political parties which emphasizes constructive relationships between civil society organizations and political parties, and Peter Schroder's theory on political strategies and tactics to win female candidates of legislative elections. This article uses a qualitative method and collects the data through interview techniques. The result of this study indicates that the relationship between Fatayat and PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) runs constructively for both have a shared history. This constructive relationship can also be applied to explain the political dynamic within Nahdlatul Ulama (NU). This article concludes that the Fatayat's strategy to win women candidates in the legislative elections was supported by a constructive relationship between Fatayat and PKB. This finding contributes to the study of the relationship between civil society organizations and political parties.

Key Words

Civil society, political party, political strategy, Fatayat, PKB, Nahdlatul Ulama

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi politik Fatayat sebagai organisasi masyarakat sipil dalam upaya memenangkan calon anggota legislatif (caleg) perempuan pada Pemilu Legislatif 2019. Sebagai alat analisis dan instrumen untuk menjawab

* Penulis untuk korespondensi:

M Anas Mahfudhi

Alamat: Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Indonesia

Email: 4nasmahfudhi@gmail.com

pertanyaan masalah, kajian ini menggunakan dua teori: teori Gwendolyn Bevis tentang *civil society and political parties* yang menekankan relasi konstruktif antara organisasi masyarakat sipil dan partai politik, dan teori Peter Schoder tentang strategi politik untuk melihat strategi dan taktik politik Fatayat dalam memenangkan caleg perempuan. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknis pengumpulan data melalui wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa relasi Fatayat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berjalan secara konstruktif karena memiliki sejarah yang mengakar kuat sehingga kedua institusi ini seringkali berjalan beriringan dalam setiap pemilihan umum. Bahkan relasi yang konstruktif juga dapat berlaku dalam setiap dinamika politik di internal NU. Artikel ini menyimpulkan bahwa strategi Fatayat dalam memenangkan caleg perempuan sangat didukung oleh relasi konstruktif dengan PKB. Temuan ini dapat memberikan kontribusi bagi kajian mengenai relasi organisasi masyarakat sipil dan partai politik.

Kata-kata Kunci

Masyarakat sipil, partai politik, strategi politik, Fatayat, PKB, Nahdlatul Ulama

Pendahuluan

Reformasi politik Indonesia telah bergulir lebih dari 20 tahun terhitung sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Suharto pada Mei 1998. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru telah menandai lahirnya perubahan politik termasuk dalam konteks relasi organisasi masyarakat sipil dan partai politik. Pada era Orde Baru, posisi organisasi masyarakat sipil dalam politik sangatlah terbatas dan berbeda dengan era reformasi yang membuka selebar-lebarnya interaksi antara organisasi masyarakat sipil dan partai politik. Organisasi masyarakat sipil dan partai politik merupakan dua institusi yang memiliki peran penting dalam menjaga dan mendorong agenda demokrasi atau agenda anti demokrasi di Indonesia (Perdana 2017). Sumbangan organisasi masyarakat sipil terhadap proses konsolidasi demokrasi dengan beragam peran yang dijalankan tentunya tidak terjadi dengan sendirinya. Menurut Cornelis Lay (2009), selain organisasi masyarakat sipil, partai politik juga berkontribusi dalam memperkuat daya tahan sistem demokrasi. Ia menjelaskan bahwa tautan politik antara organisasi masyarakat sipil dan partai politik menjadi tantangan paling serius bagi suatu negara dalam menjamin tegaknya nilai-

nilai demokrasi. Menurut Lay, studi tautan politik antara organisasi masyarakat sipil dan partai politik adalah salah satu alat ukur dalam menjelaskan proses demokratisasi. Meskipun demikian, Lay seringkali melihat kealpaan dan terputusnya tautan politik antara organisasi masyarakat sipil dan partai politik dalam konteks pembuatan kebijakan. Kealpaan tautan politik sering kali terjadi akibat adanya perbedaan isu, kapasitas serta watak kedua lembaga tersebut.

Dalam artikel mereka, Muhammad Mahsun dkk (2019) menyoroti bagaimana calon legislatif (caleg) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berasal dari Fatayat memiliki dukungan politik yang tidak dapat diragukan lagi. Menurut mereka, sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama (NU), kader Fatayat yang menjadi caleg PKB dapat membentuk tim sukses yang beranggotakan dari aktivis Fatayat karena caleg PKB yang berasal dari Fatayat memiliki jaringan organisasi yang dapat dijadikan sebagai modal sosial dalam kontetasi politik. Dengan demikian, inti dari temuan Mahsun dkk adalah kader Fatayat NU terindikasi praktik-praktik transaksional. Lebih lanjut, temuan Mahsun dkk menjelaskan bahwa anggota Fatayat yang mendapatkan kursi di parlemen merupakan bagian dari politik dinasti. Hal ini dapat membangun relasi yang konstruktif antara Fatayat dan PKB dan dapat melakukan distribusi anggota-anggotanya dengan mudah.

Sebagaimana Fatayat, secara formal organisasi 'Aisyiyah tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Namun, secara empiric, Fatayat dan 'Aisyiyah terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, politik dan keagamaan (Kurnia 2011). Sebagai badan otonom Muhammadiyah, tentunya 'Aisyiyah memiliki kepentingan atas terpilihnya calon kandidat yang sejalan dengan aspirasinya (Kurnia 2011). Oleh karena itu, 'Aisyiyah juga memiliki pandangan tertentu terhadap realitas politik.

Kedekatan relasi antara organisasi masyarakat sipil dan partai politik tentunya didorong oleh adanya intervensi kebijakan yaitu terkait UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU No. 10 2008 tentang partai politik. Menariknya, di dalam aturan undang-undang tersebut terdapat perintah yang menjelaskan kewajiban bagi partai politik untuk memenuhi kuota minimal 30 persen untuk perempuan. Kedua aturan tersebut berlaku untuk semua calon anggota legislatif dari DPR tingkat kota/kabupaten, tingkat provinsi sampai tingkat nasional (Arka 2021).

Selain didorong oleh adanya kebijakan tersebut, di sisi lain juga karena Fatayat sebagai organisasi masyarakat sipil perempuan yang peduli terhadap isu keterwakilan perempuan di parlemen dan partai politik. Fuad (2015) menjelaskan bahwa PKB bukan satu-satunya saluran politik

Fatayat. Menurut Hamsah, terdapat caleg perempuan Fatayat yang lolos dan menjadi caleg terpilih di tingkat nasional ada yang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Adapun anggota Fatayat yang berhasil lolos menjadi caleg terpilih di tingkat nasional dari Fraksi PPP adalah Umiyatul Chusna dan Wartiah. Sementara itu, caleg perempuan Fatayat yang berhasil lolos mengisi keterwakilan perempuan di parlemen melalui PKB berjumlah delapan orang, yaitu Anggia Ermarini, Siti Mukarromah, Eem Marhamah Zufa, Nihayatul Wafiroh, Ela Nuryamah, Arzetti Bilbina, Nur Nadlifah dan Luluk Nurhamida. Meskipun saluran politik Fatayat tidak hanya PKB, namun penjelasan Hamsah telah memberi gambaran utuh bahwa Fatayat lebih dekat dengan PKB dibandingkan dengan PPP atau pun partai lainnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah anggota Fatayat yang berhasil menjabat sebagai DPR RI pada pemilihan umum legislative 2019. Namun, dari data tersebut perbandingan jumlah caleg yang lolos ke parlemen lebih didominasi oleh anggota Fatayat yang juga memiliki kenggotaan di PKB daripada di PPP. Dengan adanya perbandingan inilah, kami akan memfokuskan kajian ini pada relasi Fatayat dengan PKB dalam kemenangan pemilu legislatif 2019.

Masalah yang sering muncul dari adanya relasi antara Fatayat dan PKB adalah persoalan isu keterwakilan perempuan di parlemen. Meskipun komitmen kuota 30% telah disahkan, prosentase keterwakilan dan keterpilihan perempuan di parlemen tingkat nasional hanyalah 18% pada pemilu 2009-2014. Puskapol UI (2010) merilis sebuah temuan yang menjelaskan bahwa prosentase keterwakilan dan keterpilihan perempuan di parlemen mengalami peningkatan di satu sisi. Tetapi di sisi yang lain, prosentase keterwakilan perempuan di parlemen belum memenuhi kuota yang disepakati bersama yaitu 30% untuk perempuan. Lebih lanjut, Puskapol UI (2010) menyatakan bahwa prosentase keterwakilan dan keterpilihan kaum perempuan di Dewan Perwakilan Daerah RI lebih tinggi ketika dibandingkan dengan prosentase di DPR RI yaitu dari 22,6% pada 2004 menjadi 26,5% pada 2009.

Sebagaimana studi-studi di atas, studi relasi antara organisasi masyarakat sipil dan partai politik yang berfokus pada isu gender dan politik masih dihadapkan oleh sejumlah permasalahan, yaitu persoalan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan. persoalan banyaknya caleg perempuan yang menjadi bagian dari dinasti politik. Dan terakhir, mahalnya biaya politik yang tentu menyulitkan proses kemenangan caleg perempuan dalam kontestasi pemilu, dan masih minimnya studi yang secara khusus membahas bagaimana strategi politik organisasi masyarakat sipil perempuan dalam kemenangan pemilu legislatif.

Karena itu, artikel ini berupaya melacak bagaimana strategi politik Fatayat NU dalam pemenangan caleg perempuan pada pemilu legislative 2019. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa melalui PKB, Fatayat memiliki delapan kursi di parlemen. Uniknya, strategi politik yang diterapkan di setiap daerah pemilihan seringkali dalam bentuk mempererat relasi antara Fatayat dan PKB. Strategi tersebut terbentuk atas dasar kesamaan garis ideologis dan kesamaan konstituen yang dimiliki Fatayat dan PKB.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana strategi politik Fatayat dalam relasinya dengan PKB pada pemenangan pemilihan legislatif 2019? Apakah strategi politik Fatayat bercorak klientelistik? Ataukah strategi politik Fatayat erupakan bentuk lain dari maraknya caleg perempuan yang menjadi bagian dari politik dinasti? Artikel ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan mendiskusikan strategi politik Fatayat di tingkat nasional pada pemilihan legislatif 2019. Studi ini dapat mengangkat kasus calon anggota legislatif dengan daerah pilihan mana pun dan tidak hanya terpaku dengan satu daerah pilihan. Selain itu, studi ini secara khusus akan mendiskusikan calon anggota legislatif perempuan yang pada satu sisi menjadi elit Fatayat, tapi di sisi lain juga menjadi elit PKB. Oleh karena itu, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi studi relasi organisasi masyarakat sipil dan partai politik yang berfokus pada kajian strategi politik.

Dalam upaya menulis dan menyusun artikel ini, tentunya dibutuhkan data yang akurat dan tidak dapat dibantahkan. Menurut Creswell (1994), data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Lebih lanjut, metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang memiliki keunggulan dalam menafsirkan ataupun dalam melihat suatu gejala sosial-politik secara lebih mendalam, mengamati prosesnya dan juga menarik kesimpulan. Penelitian kualitatif memang berfokus pada proses dari pada hasil atau pun produk. Oleh karena itu, penelitian kualitatif seringkali bertumpu pada proses pengumpulan data primer yang didapatkan melalui rangkaian wawancara bersama narasumber, informan utama, informan tambahan atau pendukung dan informan kunci. Metode kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam membangun masalah dari teori yang digunakan. Kajian ini berpijak pada keinginan untuk membangun sebuah pemikiran tentang relasi organisasi masyarakat sipil dan partai politik dalam pemenangan pemilihan umum dengan fokus pemilu legislatif 2019. Sebagaimana uraian sebelumnya, relasi Fatayat dan PKB memiliki keunikan yang seolah-olah merupakan relasi yang sangat istimewa antara kedua institusi tersebut.

Civil Society and Political Parties: Kerangka Teoretis

Kami menggunakan konsep Gwendolyn Bevis (2004) tentang *Civil Society and Political Parties* untuk melihat masalah relasi *civil society* dan partai politik pada kemenangan pileg 2019. Argumentasi teori Gwendolyn Bevis adalah *civil society* menyebarkan dukungan kepada banyak partai politik. Argumentasi teori tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusan organisasi masyarakat sipil untuk mengapresiasi dan mensupport sejumlah agenda politik dari partai politik. Tentunya, apresiasi dan support dari organisasi masyarakat sipil ini diberikan ketika terdapat setting agenda yang sama antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, studi ini menggunakan teori Peter Schroder yang membahas mengenai strategi politik untuk menganalisis strategi politik Fatayat dalam relasinya dengan PKB. Argumentasi dari teori Schroder ini adalah bahwa setiap strategi memiliki tujuan, saran dan cara. Teori ini menjelaskan bagaimana strategi politik dibentuk berdasarkan faktor internal dan eksternal yang kemudian digunakan untuk merealisasikan cita-cita bersama.

Menurut Bevis (2004), realitas politik berkembang jauh lebih kompleks dari hanya sekedar membahas relasi, permusuhan dan jarak antara organisasi masyarakat sipil dan partai politik. Pandangan kritis yang dapat membedakan antara organisasi masyarakat sipil dan partai politik adalah bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki kekuatan untuk menuntut dan mengkritik kebijakan pemerintah. Sedangkan, partai politik memiliki kekuatan untuk mengimplementasikan dan membuat kritik menjadi sebuah kebijakan melalui kursi di parlemen. Bevis (2004) mengklasifikasikan beberapa peran kunci yang dimainkan oleh organisasi masyarakat sipil atau pun partai politik. Pertama, untuk pemberdayaan dan perkembangan kader, partai politik terlihat semakin mengandalkan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh organisasi masyarakat sipil. Kedua, sejumlah partai politik berkembang tidak terlepas dari kontribusi organisasi masyarakat sipil sebagai think tank yang berfungsi mengembangkan dan menyatukan flatfrom kedua lembaga tersebut. Ketiga, partai politik belakangan ini memproyeksikan isu-isu strategis bersama dan melalui agenda yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat sipil. Terakhir, partai politik sebagai mesin kemenangan politik dalam pemilu sudah dilengkapi dengan kampanye *door to door* yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Dari klasifikasi yang dicatat oleh Bevis memperjelas fungsi representasi, mobilisasi, bahkan pencalonan yang semakin banyak dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil melalui partai politik.

Selain itu, Bevis (2004) juga membagi relasi organisasi masyarakat sipil dan partai politik menjadi tiga dimensi. Dimensi pertama, relasi

organisasi masyarakat sipil dan partai politik berdasarkan jenis kegiatan yang menghubungkan kedua lembaga tersebut. Dimensi kedua, relasi organisasi masyarakat sipil dan partai politik berdasarkan kekuatan koneksi yang mengukur seberapa dekat dan jauh jarak ke dua lembaga tersebut. Dari sudut pandang organisasi masyarakat sipil, setidaknya ada tiga jenis jara relasi yang menghubungkan kedua lembaga tersebut: Pertama, menghindari kontak dengan partai politik dan kedua, mendistribusikan dukungan ke seluruh partai politik. Dimensi ketiga, relasi organisasi masyarakat sipil dan partai politik berdasarkan arah pengaruh dalam relasi kedua lembaga tersebut. Terakhir relasi antara organisasi masyarakat sipil dan partai politik perlu dikaji arah pengaruhnya.

Selain itu, kami menggunakan teori strategi politik dari Peter Schroder (2000) yang memandang bahwa strategi dan politik merupakan dua hal yang seringkali berjaln dan berkelindan antara satu dengan yang lainnya. Secara mendasar, jika setiap aktor politik yang ingin mencapai sebuah tujuan dalam jangka waktu yang panjang, maka aktor politik tersebut sudah sebaiknya menyiapkan konsep perjuangan yang tidak hanya untuk mencapai keinginan dan kekuasaan yang bersifat sesaat. Hal ini disebabkan oleh sebuah strategi politik yang menjelaskan bahwa aktor politik sudah sebaiknya merumuskan konsep perjuangan yang sistematis dan terstruktur yang juga didukung dengan implementasi yang dilakukan secara konsekuen. Menurut Schroder (2000), strategi politik merupakan salah satu konsep perjuangan politik yang dapat merealisasikan rencana dan cita-cita politik, misalnya, dengan mengesahkan aturan baru, menciptakan struktur yang baru dalam sebuah sistem politik yang dapat dijalankan secara terukur dalam mencapai cita-cita politik.

Lebih lanjut, dalam teori Schroder dijelaskan bahwa ada tiga unsur terpenting dalam strategi politik, yaitu cara (*ways*), sarana (*means*) dan tujuan (*ends*). Dengan demikian, strategi politik menuntut sang aktor politik untuk memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan yang jelas tersebut, dapat dicapai dengan menggunakan sarana yang tersedia dan tentunya juga dengan cara-cara yang taktis dan strategis. Ketika konsep strategi dimaknai dalam konteks politik, maka tujuan yang dimaksudkan di atas adalah tujuan untuk dapat berkuasa dan memperoleh kekuasaan. Dengan demikian, seorang aktor politik (politisi) dapat memperoleh kekuasaan hingga dapat berkuasa ketika ia dapat memenangkan pemilu dengan bermodalkan sarana yang sudah dimiliki. Adapun sarana-sarana yang dimaksudkan adalah dapat berbentuk jaringan sosial, jaringan politik dan juga sumber-sumber modal ekonomi.

Selain ketiga unsur penting di atas, Schroder (2000) juga membagi strategi politik menjadi dua bagian. Pertama, strategi ofensif yang terdiri dari strategi politik yang bertujuan untuk memperluas pasar dan strategi untuk menembus pasar. Kedua, strategi politik yang bersifat defensif. Tujuan dari strategi defensif ini adalah untuk mempertahankan pasar. Dalam konteks politik, pasar seringkali dimaknai sebagai pemilih ataupun lawan politik lainnya. Jika yang menjadi fokus pembahasan adalah strategi politik yang ditujukan untuk memenangkan pemilu, maka terdapat sejumlah aspek yang perlu diamati untuk dapat memilih dan menjawab apakah strategi politik yang telah disiapkan cukup efektif atau tidak.

Schroder (2000) menjelaskan bahwa lebih jauh lagi juga terdapat dua faktor strategi politik yang dapat menentukan menang ataupun kalah, yaitu faktor internal sang aktor politik dan faktor eksternal sang aktor politik. Faktor internal dari sang aktor politik yang dimaksudkan oleh Schroder ini dapat berupa profil individu, program kerja, kinerja dan juga sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, jaringan ataupun dalam bentuk struktur politik. Sedangkan faktor eksternal dari sang aktor politik yang dapat mempengaruhi implementasi strategi politik adalah pesaing politik, struktur masyarakat, mulai dari rakyat, kebutuhan pemilih, perilaku pemilih dan sejumlah perubahan yang terjadi ditengah masyarakat, baik berupa tern politik ataupun berupa isu yang sedang berkembang.

Dari semua penjelasan di atas, jelas bahwa strategi politik memiliki unsur, aspek dan faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi seorang aktor politik untuk berkuasa dan memperoleh kekuasaan. Teori strategi politik ini digunakan untuk menjelaskan bahwa sebagai organisasi perempuan, Fatayat memiliki cara (*ways*), sarana (*means*) dan tujuan (*ends*). Kami dapat menjelaskan secara detail mengenai bagaimana strategi politik Fatayat NU ketika alat analisa yang digunakan adalah teori Peter Schroder tentang strategi politik. Oleh karena itu, kami berupaya menjelaskan bagaimana tujuan, sarana dan cara yang dimiliki Fatayat dapat mempermudah atau pun menjadi faktor penting dalam relasinya dengan PKB.

Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, ada dua asumsi dalam penelitian ini. Pertama, Fatayat NU memiliki kedekatan dengan PKB pada Pileg 2019. Kedekatan relasi antara kedua lembaga ini mengindikasikan adanya keberpihakan yang mengakar dan berjangka panjang sehingga melahirkan relasi yang konstruktif. Kedua, strategi pemenangan politik Fatayat pada Pileg 2019 dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang sedang berkembang. Lingkungan internal dan eksternal ini adalah faktor-faktor yang bersifat penting dan perlu untuk dapat mendukung

serta menunjang seorang aktor politik dalam mencapai cita-cita politiknya, khususnya dalam konteks bersaing dengan lawan-lawan politik. Pembagian faktor internal dan eksternal ini didasarkan atas pengaruh dan kontrol organisasi terhadap lingkungan-lingkungan *civil society*. Faktor lingkungan internal ini memiliki implikasi pada nilai-nilai, ruang-ruang kaderisasi, keanggotaan dan kader dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi masyarakat sipil. Sedangkan faktor eksternal berimplikasi pada kebijakan pemerintah, isu sosial politik ataupun aturan yang sedang hangat diperdebatkan di tengah masyarakat. Pada faktor internal dan eksternal organisasi, kami akan membahas secara spesifik mengenai pergulatan-pergulatan yang sedang terjadi, baik persoalan nomor urut atau pun penetapan dapil. Dengan demikian, kedua teori tersebut di atas dianggap relevan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Perspektif Politik NU dan Organisasi Perempuan NU

Bagian ini akan berfokus membahas alasan mengapa NU (Nahdlatul Ulama) dan organisasi perempuan NU khususnya Fatayat nampak terlihat seolah-olah harus berpolitik praktik. Sebagaimana penjelasan Margaret Aliyatul Maimunah, Sekretaris Jendral Fatayat NU sekaligus Caleg perempuan PKB, setiap organisasi masyarakat sipil dapat dipastikan memiliki kepentingan untuk berpolitik dan memengaruhi kebijakan melalui parlemen. Ia menjelaskan:

Yang namanya organisasi pasti berkepentingan untuk berpolitik. Misalnya, kalau kita (NU dan banom-banomnya) ingin terjun ke politik, tentu ingin masuk ke partai politik yang sesuai dengan visi misi kita dan itu di PKB. Tapi, anggota kita ada juga yang di Gerindra, ada juga yang di Demokrat dan PDIP. Jadi, dengan partai manapun *it's oke*, gak ada masalah itu (Wawancara, 15 Agustus 2021).

Pada awal era reformasi, keinginan berpolitik NU diterjemahkan dengan mendirikan partai politik yang bernama PKB. Fenomena terbaru di awal era reformasi ini menunjukkan posisi NU yang pada satu sisi sebagai organisasi masyarakat sipil. Namun di sisi lain, NU juga mendirikan partai politik. Menurut kami, dengan menggunakan teori Gwendolyn Bevis dapat dijelaskan bahwa proses NU dalam mendirikan partai politik merupakan bentuk lain dari kesadaran akan keterbatasan perannya sebagai organisasi masyarakat sipil. Artinya, NU sudah sangat memahami keterbatasan peran dan ruang dalam posisinya sebagai organisasi masyarakat sipil. Meski awalnya NU menyatakan dirinya bergerak di luar parlemen, pada akhirnya NU menyadari bahwa gerakan ekstra parlemen merupakan wujud

dari ketidakefisienan dalam mendesak agenda perubahan yang sesuai dengan aspirasi warga Nahdliyyin. Dengan memiliki partai politik sendiri, tentunya NU berupaya untuk menawarkan solusi terhadap masalah yang sering dihadapi oleh relasi antara partai politik dan organisasi masyarakat sipil.

Dari semua penjelasan ini dapat ditarik benang merah mengenai tidak mudahnya NU atau pun organisasi perempuan NU keluar dari politik praktis. Sebagaimana penjelasan di awal bahwa organisasi perempuan yang di maksud di sini adalah Fatayat dan Muslimat. Dengan demikian, tujuan utama Fatayat dalam berpolitik adalah untuk menjadi salah satu jalan alternatif. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Anggia Ermarini, Ketua Umum Fatayat NU sekaligus Caleg perempuan PKB:

Salah satu sarana, saluran untuk menjawab keberpihakan apa yang sudah kita perjuangkan seperti tujuan Fatayat itu adalah dengan jalur politik. Politik itu satu-satunya. Tidak harus partai politik sebenarnya. Kita berorganisasi itu menjadi bagian dari berpolitik. Tetapi menggunakan saluran politik (partai politik) menjadi salah satu jalan alternatif (Wawancara, 11 Agustus 2021).

Perspektif politik NU dan organisasi perempuan NU di atas dapat memberikan penjelasan yang menganggap wajar ketika kader perempuan NU mampu menempati posisi strategis baik di eksekutif ataupun legislatif. Hal ini sejalan dengan pernyataan Margaret Aliyatul Maimunah berikut:

Kalau kita bicara kader perempuan NU termasuk pengurus Fatayat, potensinya itu macam-macam. Jadi, memang ada sebagian yang ASN ada sebagian yang professional, ada yang di legislatif, ada juga yang di eksekutif sampai wakil gubernur. Bahkan, Bu Ida Fauziyah itu mantan ketua umum kita (Fatayat) yang mampu menempati posisi Menteri (Wawancara, 15 Agustus 2021).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa NU merupakan organisasi besar yang didirikan untuk mencetak kader-kader unggul sehingga dapat menjadi pemimpin. Menurut Margaret Aliyatul Maimunah, yang berhasil melakukan distribusi kader ke sejumlah posisi strategis tidak hanya Fatayat, melainkan juga Muslimat sebagai organisasi perempuan NU yang menunjukkan adanya keberhasilan dalam melakukan distribusi kader.

Swarizona (2021) menjelaskan bahwa terpilihnya Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur merupakan salah satu hasil perjuangan kader Fatayat dan Muslimat. NU sebagai sebuah organisasi

masyarakat sipil tentunya memiliki jumlah anggota yang tidak dapat diragukan lagi, terlebih jumlah anggota yang berada di daerah Jawa bagian timur. Keterlibatan Khofifah Indar Parawansa sebagai kader dan aktivis perempuan NU sudah terjalin sejak ia menjadi mahasiswa. Keikutsertaannya dalam dunia politik diawali ketika dia tergabung dalam organisasi mahasiswa NU yang lebih dikenal dengan sebutan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Surabaya. Waktu menjadi aktivis PMII, ia sempat menjabat sebagai ketua Cabang PMII Surabaya. Tidak berhenti sampai di situ, pengalaman politiknya juga terlihat ketika ia menjabat sebagai Ketua Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), hingga akhirnya ia dinobatkan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat IPPNU pada tahun 1990. Karir politik Khofifah Indar Parawansa semakin melejit ketika ia berhasil menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU.

Sebagaimana penjelasan di awal, Fatayat memiliki kader yang berhasil menjabat sebagai anggota DPR RI sebanyak 10 orang, dua di antaranya tercatat menjadi anggota PPP dan selebihnya merupakan kader PKB. Tidak hanya itu, pada wawancara dengan Margaret Aliyatul Maimunah, terungkap bahwa kader dan anggota Fatayat juga berhasil menjabat sebagai posisi strategis, di antaranya adalah Chusnunia Chalim yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Lampung dan Ida Fauziyah yang diangkat sebagai Menteri Ketenagakerjaan oleh Presiden Joko Widodo. Eka Yonavilbia (2020) dalam sebuah artikel menuliskan bahwa sebagai kader Fatayat, Chusnunia Chalim mengajak Fatayat untuk dapat lebih inovatif. Menurut Chalim, tantangan dan segala permasalahan yang ada akan dapat teratasi ketika Fatayat mampu beradaptasi dengan zaman. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Fatayat merupakan garda terdepan dalam upaya mengoptimalkan kerja-kerja organisasi yang lebih inovatif. Ida Fauziyah merupakan suksesor Hanif Dhakiri sebagai Menteri Ketenagakerjaan yang sebelumnya. Karir politik Ida Fauziyah tercatat sebagai anggota DPR termuda yang masuk parlemen pada tahun 1999, yang saat itu ia berumur 29 tahun. Ida Fauziyah juga tercatat sebagai legislator termuda dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan juga berhasil memenangkan pemilihan legislatif selama tiga periode berturut. Dengan demikian, NU melalui organisasi perempunnya, baik Muslimat atau pun Fatayat, telah berhasil mencetak sejumlah tokoh dan pemimpin perempuan di pentas politik Indonesia.

Relasi Fatayat dan PKB dalam Pemilihan Umum

Relasi antara Fatayat dan PKB bersifat informal karena relasi ini tidak pernah dilakukan atas dasar kebijakan formal keorganisasian. Pada praktiknya, relasi antara Fatayat dan PKB sudah berjalan dan bertahan cukup lama serta

memiliki kedekatan yang mengakar kuat mengingat kesamaan ideologi, nilai, visi dan misi. Menurut Margaret Aliyatul Maimunah, meskipun kader Fatayat tidak diharuskan memiliki relasi dengan PKB, sudah bukan rahasia lagi bahwa sejumlah kader-kader Fatayat kebanyakan berjuang melalui PKB. Adanya kedekatan antara Fatayat dan PKB bukan berarti bahwa Fatayat tidak memiliki kedekatan dengan partai lainnya karena pada akhirnya, sebagaimana halnya NU, Fatayat juga memiliki sejumlah kader yang berkiprah di partai politik lain. Margaret Aliyatul Maimunah menjelaskan:

Kalau Fatayat kaitannya dengan politik sebenarnya begini. Fatayat itu *nggak* pernah mengarahkan harus di PKB, tetapi kita mengarahkan bahwa mana organisasi partai atau partai politik yang itu sejalan dengan visi dan misi Fatayat. Kira-kira begitu. Nah, kemudian, akhirnya titik temunya lebih banyak di PKB. Sebenarnya, jujur diakui begitu itu sehingga kemudian membuat teman-teman kita banyak yang ke PKB. Jadi, *nggak* terlalu rumit untuk memberikan penguatan dari sisi itu (Wawancara, 15 Agustus 2021).

Sementara itu, menurut menurut Hasanuddin Wahid, Sekretaris Jenderal DPP PKB, relasi antara Fatayat dan PKB bukan hanya terjadi sejak pemilihan umum legislatif 2019, tetapi juga dapat dilihat dari pemilu sebelumnya. Relasi Fatayat dan PKB dalam momentum politik terjadi pada pileg 2004, 2009, 2014, pemilu 2018, 2019 dan pileg 2019 yang diselenggarakan secara serentak. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah relasi ini kebanyakan bersifat individual, bukan formal keorganisasian. Hasanuddin Wahid berkata:

Kalau relasi Fatayat dan PKB itu terjadi sejak lama. Bisa dicek, misal Mbak Ida, mantan ketua umum Fatayat, pernah maju di Pilgub Jateng 2018. Dan banyak lagi contoh-contohnya itu. Kedekatan Fatayat dan PKB bisa dikatakan sejak PKB berdiri dan dirikan oleh PBNU (Wawancara, 12 Agustus 2021).

Pada pemilu legislatif 2004, Ida Fauziyah sebagai Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Advokasi Fatayat berhasil lolos menjadi anggota DPR RI melalui PKB dapil Jawa Timur VII. Selain Ida Fauziyah, pengurus Fatayat yang menjabat sebagai anggota DPR RI adalah Maria Ulfah Ansor meski hanya berstatus pengganti antar waktu. Pada pemilu

legislatif 2009, Ida Fauziyah sebagai pengurus Fatayat sekaligus petahana berhasil menjadi anggota DPR RI. Sementara itu, pada pemilu legislatif 2014, kader Fatayat yang berhasil lolos di parlemen selain Ida Fauziyah adalah Siti Mukarromah dengan perolehan suara 36.312 di dapil Jateng VIII, Nihayatul Wafiroh dapil Jatim III dengan perolehan suara 90.197, Siti Masrifah yang memperoleh suara 32.308 di dapil Banten III.

Pada pemilu 2018, Fatayat bersepakat mendukung sejumlah anggota dan kader Fatayat yang mencalonkan diri pada pemilu legislatif ataupun pilkada. Adapun anggota dan kader Fatayat yang maju sebagai calon wakil kepala daerah adalah salah satunya Ida Fauziyah yang juga pernah menjabat sebagai ketua umum Fatayat. Dukungan Fatayat kepada Ida Fauziyah tersebut tercermin pada semangat juang serta militansi secara kultural. Selain itu, dapat terlihat dari adanya komando Fatayat kepada seluruh anggota dan kader untuk mendukung dan memenangkan Ida Fauziyah. Dalam pemilu 2018, Fatayat memenangkan Ida Fauziyah dengan tujuan dapat mengedukasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, budaya dan politik. Dengan spirit juang yang dimiliki Fatayat tersebut, akhirnya memanggil Fatayat untuk dapat ikut serta dalam kontestasi politik. Hal ini tentunya juga buah dari adanya dorongan ulama yang begitu kuat agar Fatayat dapat berpolitik tanpa adanya subordinasi.

Semua perjuangan politik Fatayat yang didukung oleh ulama NU bermuara pada upaya untuk mendukung PKB sebagai parpolnya orang NU (Nahdliyyin). Dengan demikian, perjuangan Fatayat untuk memenangkan Ida Fauziyah bukan hanya karena dia eks ketua Fatayat, tetapi juga karena kader PKB. Artinya, pada satu sisi Fatayat memiliki kencerungan untuk mendukung dan memenangkan kader PKB. Namun, di sisi lain, Fatayat juga memiliki pandangan politik sesuai dengan dinamika politik yang sudah berkembang. Anggia Ermarini, Ketua Umum Fatayat, menjelaskan:

Jawa pasti ya. Jawa Timur dan Jawa Tengah itu gemuk banget, kemudian disusul Jawa Barat, Banten, lalu DKI Jakarta. [Di seluruh Indonesia, di luar Jawa itu, yang gemuk itu Lampung, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Ambon. Keren banget mereka. Ini menjadi modal kuat untuk mengusung calon dari internal Fatayat seperti Mbak Ida Fauziyah di pilkada Jateng. Bahkan kemarin kita juga berpartisipasi memenangkan pasangan Jokowi-Maruf Amin *kayak* yang dilakukan teman-teman Fatayat Kota Malang (Wawancara, 11 Agustus 2021).

Pada pilpres 2019, Fatayat ikut berpartisipasi dalam memenangkan kandidat petahana yaitu Joko Widodo berpasangan dengan Maruf Amin. Oleh karena itu, pada pemilu presiden 2019, Fatayat mendukung dan ingin memenangkan calon petahana tersebut. Dukungan Fatayat tersebut merupakan salah satu bentuk nyata dukungan NU berserta badan otonom lainnya untuk memenangkan Ma'ruf Amin sebagai wakil dari NU. Selain itu, dukungan Fatayat untuk Joko Widodo dan Maruf Amin juga disebabkan representasi dari kalangan mayoritas Islam. Di wilayah Jawa bagian timur, bentuk dukungan Fatayat terkonsolidasi dan terpusat pada komunitas yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN). Gerakan JKSN ini merupakan komunitas yang dibentuk Gubernur Jawa Timur 2018-2023, Khofifah Indar Parawansa yang juga ketua umum PP Muslimat NU periode 2015-2020. Dengan JKSN ini, Fatayat bersama dengan badan otonom NU lainnya secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan dan ingin memenangkan Joko Widodo dan Maruf Amin.

Dalam pemilihan umum legislatif 2019, Fatayat mencalonkan sejumlah kader dan anggotanya melalui PKB. Keuntungan yang didapatkan Fatayat dalam relasinya dengan PKB cukup beragam. Menurut Hasanuddin Wahid, Sekretaris Jendral DPP PKB, telah memberikan ruang yang sangat luas agar Fatayat dapat mengekspresikan perjuangan politiknya melalui PKB. Penjelasan di atas merupakan sedikit contoh dari bagaimana keuntungan Fatayat dalam relasinya dengan PKB sejak awal-awal reformasi. Lebih lanjut, Hasanudin Wahid menjelaskan:

Buat Fatayat sendiri, kontribusi PKB adalah memberikan ruang yang luas kepada semua kader-kader Fatayat untuk mengeksperimentasikan perjuangannya di jalur politik. Jadi, PKB *ngasih* ruang yang luas Fatayat untuk menjadi ikon-ikon kunci di PKB, *kayak* mantan ketua umum Fatayat dijadikan menteri, mbak Ida Fauziyah. ini membuktikan apresiasi partai ini terhadap Fatayat. Siapa pun aktivis Fatayat yang mau berkegiatan dan aktif di Partai Kebangkitan Bangsa dia akan mendapatkan apa namanya tempat posisi dan porsi yang sangat-sangat luar biasa. Cek saja sampai ke daerah-daerah. Banyak sekali kader-kader Fatayat yang menjadi pengurus PKB, jadi anggota DPR dari PKB, bahkan dicalonkan PKB menjadi bupati atau wakil bupati dan sebagainya. Contohnya, wakil bupati Kediri itu Fatayat. Artinya, ruang-ruang itu sangat diberikan oleh PKB (Wawancara, 12 Agustus 2021).

Dengan demikian, relasi antara Fatayat dan PKB merupakan salah satu contoh relasi yang saling menguntungkan satu sama lain. Pada satu sisi, sebagai partai politik PKB membutuhkan upaya mobilisasi massa dan kader untuk dapat memenangkan pemilu. Sedangkan di sisi yang lain, Fatayat juga membutuhkan PKB sebagai saluran politik dan saluran alternative dalam posisinya sebagai organisasi masyarakat sipil perempuan.

Strategi Politik Fatayat dalam Pemenangan Caleg Perempuan pada Pemilu Legislatif 2019

Strategi politik Fatayat NU dalam pemilu legislatif 2019 ini berkaitan dengan sejumlah unsur dan elemen serta seperangkat narasi perjuangan yang telah disepakati bersama. Secara garis besar, strategi politik Fatayat NU adalah dmendistribusikan kader Fatayat NU ke sejumlah partai politik. Dengan demikian, kader Fatayat tidak hanya berada dalam satu partai melainkan berada di banyak partai politik. Anggia Ermarini, Ketua Umum, Fatayat NU menjelaskan:

Strategi Fatayat lumayan berserak-serak meskipun sebenarnya Fatayat kalau di Fatayat banyak juga dari PPP, Gerindra, dan Demokrat. Di pimpinan pusat itu ada semua, tetapi lebih banyak yang di PKB jelas itu secara sejarah *enggak* bisa dipungkir (Wawancara, 11 Agustus 2021).

Anggia Ermarini, Ketua Umum Fatayat, menjelaskan bahwa secara keorganisasian tidak memiliki strategi yang khusus dan baku. Meskipun Fatayat tidak memiliki strategi yang baku bukan berarti tidak memiliki strategi atau mekanisme dalam memenangkan pemilihan umum. Jppn.com (2019) mengungkap berapa banyak kader Fatayat yang dinyatakan lolos sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Dalam artikel berjudul “Pengin Tau Berapa Kader Fatayat NU Jadi Anggota DPR RI 2019-2024?”, ada sembilan kader Fatayat mejadi calon anggota DPR di mana tujuh orang mencalonkan diri melalui PKB dan selebihnya mencalonkan diri melalui PPP. Adapun kader Fatayat yang terpilih sebagai anggota DPR RI dari PKB adalah Anggia Ermarini, Siti Mukarromah, Eem Marhamah Zulfa, Nihayatul Wafiroh, Ela Nuryamah, Arzeti Bilbina, Nur Nadlifah serta Luluk Nurhamidah. Sedangkan Wartiah dan Ema Umiyatul Chusna berasal dari PPP. Lebih lanjut, mengenai hal ini Anggia Ermarini memberikan penjelasan bahwa:

Dari dulu kita dekat dengan PKB. Kemudian, saya akan membantu para kader untuk maju dalam pemilihan legislatif yang lalu. Pasti akan lebih mudah dibandingkan misalnya kalau saya ngomong ke partai politik lain (Wawancara, 11 Agustus 2021).

Menurut Sekretaris Jendral Fatayat, Margaret Aliyatul Maimunah, terdapat beberapa strategi Fatayat untuk memenangkan pemilu. Ia menjelaskan strategi ini juga merupakan cara untuk meyakinkan PKB atau masyarakat luas agar percaya bahwa Fatayat mampu berkecimpung di dunia politik. Adapun strategi politik Fatayat dalam kemenangan pemilihan umum legislative 2019 adalah sebagai berikut: Kekuatan Fatayat, jaringan Fatayat, pengaruh nama besar NU, dan profil calon anggota DPR dari Fatayat.

Kekuatan Fatayat

Dalam sebuah strategi politik, eksistensi sebuah organisasi merupakan kekuatan tersendiri dalam menyiapkan strategi politik. Terkait hal ini, Sekretaris Jendral Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah berkata: “Sebenarnya Fatayat itu sendiri juga kekuatan. Jadi, bisa juga dijadikan strategi untuk lobi-lobi politik, bisa juga dijadikan untuk meyakinkan para pemilih” (Wawancara, 15 Agustus 2021).

Fatayat telah menghimpun kekuatan untuk memenangkan kontestasi pemilu. Secara mendasar, gerakan dan dukungan politik Fatayat nampak terlihat menarik dan unik untuk diteliti lebih mendalam. Ketika berada pada situasi politik yang aman dan stabil, Fatayat dengan segala nilai yang diperjuangkan memberikan jalan hidup bagi siapa pun. Namun, di saat yang sama Fatayat dapat berubah menjadi organisasi yang siap mengkritik dan mengatakan kebenaran ketika situasi politik sedang tidak stabil. Salah satu contohnya adalah ketika Fatayat secara keorganisasian menyatakan sikap untuk memerangi budaya partiarhi yang mengekang kebebasan perempuan yang merupakan wujud dari adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Ditambah lagi, ketika Fatayat merasa dilema karena pada satu sisi ia adalah jelmaan dari gerakan organisasi masyarakat sipil, tetapi di sisi lain, Fatayat juga memiliki niat baik untuk dapat ikut serta dalam setiap gerakan politik. Posisi antara sebagai organisasi masyarakat sipil dan sebagai gerakan politik ini nampak terlihat jelas ketika terdapat perdebatan mengenai relasi Fatayat dengan partai politik, khususnya partai politik yang seringkali disandingkan dengan Fatayat.

Secara formal, Fatayat NU memang selalu bersikap netral dan tidak melakukan gerakan-gerakan politik praktis. Namun, fakta politik menjelaskan bahwa Fatayat memiliki kecenderungan terhadap salah

satu partai politik dan sangat sulit untuk disanggah. Dengan demikian, kecenderungan dan keberpihakan Fatayat terhadap salah satu partai politik ini sangat mudah untuk lihat oleh kader dan anggota Fatayat. Contohnya adalah eks ketua umum Fatayat Ida Fauziah terpilih sebagai salah satu menteri di kabinet Jokowi. Selain itu, juga nampak terlihat dari menangnya aktor Fatayat lainnya pada kontestasi pemilu legislatif dan eksekutif cukup membuktikan bagaimana kekuatan yang dimiliki Fatayat NU.

Profil dan Jaringan Fatayat

Dalam strategi politik untuk dapat memenangkan kandidat anggota DPR, selain kekuatan organisasi, profil dan jaringan yang dimiliki Fatayat NU juga merupakan poin-poin yang perlu dipertimbangkan. Artinya, profil dan jaringan Fatayat NU yang berada ditingkat RT/RW sampai ke nasional ini sudah seharusnya memiliki peran penting dalam strategi politiknya. Terkait hal ini, Sekretaris Jendral Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah menjelaskan:

Profil dan jaringan Fatayat itu bukan cuma ada di tingkat pusat, akan tetapi juga ada di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, dan tingkat RT dan RW. Kita juga punya di luar negeri. Organisasi kita itu secara struktur besar banget, punya jaringan yang luas juga (Wawancara, 15 Agustus 2021).

Profil dan jaringan yang dimiliki Fatayat dapat menjadi strategi politik dalam upaya memenangkan pemilu. Dengan demikian, sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil perempuan, Fatayat seringkali bergerak dan berperan secara aktif untuk mempromosikan konsep kesetaraan gender. Konsep yang ditawarkan oleh Fatayat ini tidak hanya mengenai kesetaraan gender, melainkan juga menyuarakan kepedulian serta nasib perempuan dengan program yang ramah dengan gender. Artinya, Fatayat secara keorganisasi juga memiliki tekad perjuangan untuk dapat mendobrak dan mengakhiri adanya kekerasan seksual yang seolah-olah sudah menjadi budaya.

Secara strategis, tugas perjuangan Fatayat NU adalah dengan memperjuangkan hak-hak perempuan dan sejumlah kebutuhan mendasar bagi perempuan. Contohnya, memperjuangkan pendidikan perempuan, kesehatan perempuan dan ekonomi perempuan. Dalam konteks pendidikan, perempuan masih tertinggal jauh dari laki-laki. Dalam hal kesehatan juga demikian, perempuan masih jauh di bawah laki-laki yang standar minimal

pelayanan kesehatan seorang ibu dan anak masih di bawah standar WHO. Sedangkan dalam konteks ekonomi, perempuan Indonesia seringkali kekurangan akses untuk dapat menghasilkan sumber ekonomi dan modal politik. Sejumlah persoalan yang diderita perempuan ini menuntut Fatayat NU untuk mengaktifkan kepedulian kepada kaum perempuan, terlebih perempuan yang ada di pedesaan. Dengan demikian, Fatayat NU tidak hanya dapat disebut sebagai organisasi kader perempuan, akan tetapi juga telah menjadi sebuah wadah untuk membangun sebuah tatanan sosial yang lebih bersahabat dengan gender, demokratis dan konstruktif.

Pengaruh Nama Besar NU

Nama besar NU memiliki pengaruh tersendiri dalam meningkatkan kekuatan atau pun pengaruh Fatayat dalam strategi politik. Sebagai badan otonom NU, tentu Fatayat diberkahi pengaruh organisasi masyarakat sipil terbesar di Indonesia ini. Terkait hal ini, Margaret Aliyatul Maimunah, Sekretaris Jendral Fatayat NU menjelaskan: “Nama besar NU menjadi kekuatan yang dimiliki oleh Fatayat. NU bagaimanapun disebut sebagai organisasi masyarakat terbesar juga” (Wawancara, 15 Agustus 2021).

NU adalah organisasi masyarakat sipil yang memiliki jumlah anggota terbanyak dan terbesar di Indonesia. NU didirikan oleh sejumlah kyai dan ulama sekitar pada tahun 1926. NU memiliki dua organisasi perempuan dengan cabang di seluruh nusantara. Pertama adalah Muslimat, organisasi perempuan yang didirikan di bawah payung NU pada 29 Maret 1946 di Purwokerto, Tengah Jawa, untuk anggota berusia empat puluh tahun ke atas. Organisasi kedua adalah Fatayat yang berdiri pada 24 April 1950. Fatayat mewadahi generasi lebih muda perempuan NU, dengan anggota yang memiliki umur sekitar 20 sampai 40 tahun. Tentunya, Fatayat NU sebagai salah satu organisasi perempuan NU memiliki kekuatan dan pengaruh besar karena kebesaran dan pengaruh NU.

Profil Calon Anggota DPR

Profil calon anggota DPR yang diusung memiliki posisi yang tak kalah pentingnya karena citra mereka dapat memberikan gambaran untuk masyarakat terkait bagaimana watak kepemimpinan, visi misi perjuangan dan lain-lainnya. Margaret Aliyatul Maimunah, Sekretaris Jendral Fatayat NU berkata:

Selain itu, profil kandidat yang akan didorong Fatayat pasti berpengaruh. Sebagai organisasi besar sebenarnya kita bisa mendorong kader kita apapun kondisinya apapun kapasitasnya. Tentu kalau kadernya berkualitas akan menjadi nilai tersendiri, yaitu bisa menjadi kekuatan untuk didorong (Wawancara, 15 Agustus 2021).

Profil calon dari Fatayat menjadi kekuatan tersendiri untuk dapat dicalonkan melalui partai politik tertentu. Terlebih praktik demokrasi di Indonesia menggunakan proporsional terbuka. Pada pemilihan umum legislatif 2019, terhitung cukup ketat karena persaingan politik terjadi dalam sistem proporsional terbuka. Sistem ini menuntut agar setiap caleg bersaing tidak hanya di setiap dapil, tetapi juga di setiap partainya sendiri. Oleh karena itu, untuk setiap caleg terdaftar dapat memenangkan pemilu legislatif ketika ia berhasil mengalahkan caleg-caleg yang ada di partainya sendiri. Persaingan yang cukup ketat ini, secara langsung ataupun tidak langsung telah menuntut setiap caleg memiliki profil dan ketokohan yang kuat serta mengakar. Profil dan ketokohan para caleg merupakan salah satu modal penting yang dapat mempengaruhi dalannya pemilu sebagaimana kader Fatayat NU yang menjadi caleg perempuan melalui PKB. Sebagian besar caleg yang berhasil merupakan tokoh yang memiliki profil yang kuat dan pantas menjabat sebagai wakil rakyat.

Kesimpulan

Relasi konstruktif antara Fatayat dan PKB merupakan faktor terpenting dalam strategi memenangkan pemilihan umum legislatif 2019. Adapun strategi politik yang digunakan Fatayat dapat dibaca melalui mekanisme dan tahapan-tahapan yang dilakukan secara keorganisasian meskipun tidak secara formal. Secara garis besar, teori organisasi masyarakat sipil dan partai politik memiliki perspektif dan cara pandang yang berbeda satu sama lain. Meskipun relasi antara Fatayat dan PKB nampak terlihat sebagai dua institusi yang berbeda, pada dasarnya kedua institusi ini saling membutuhkan dan akibatnya relasi antar keduanya bersifat konstruktif. Pada satu sisi, Fatayat berupaya meningkatkan angka keterwakilan perempuan di parlemen menjadi perjuangan yang tidak dapat dielakkan. Di sisi lain, PKB juga membutuhkan dukungan dan membutuhkan sumberdaya kader perempuan potensial dari Fatayat. Fatayat dan PKB terlihat sebagai dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Untuk meloloskan calonnya dalam pemilu legislatif 2019, strategi politik Fatayat meliputi penggunaan kekuatan Fatayat sebagai organisasi besar, jaringan Fatayat, pengaruh nama besar NU, dan profil calon anggota legislatif yang diusungnya.

Endnotes

Data diolah dari SK PP Fatayat NU dan artikel berita yang melansir daftar caleg PKB yang lolos sebagai anggota DPR RI.

Referensi

- Alagappa, Muthiah. 2001. "Asian Civil-Military Relations: Key Developments, Explanations, and Trajectories." In *Coercion and Governance: The Declining Political Role of the Military in Asia*, edited by Muthiah Agappa. Stanford: Stanford University Press.
- Arka, I.K. 2021. "Pengaruh Affirmative Action Terhadap Elektabilitas Calon Perempuan Dalam Pemilu 2019 di Kota Denpasar." *JIP* 2 (3).
- Aspinall, Edward et al. 2021. "Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?" *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40 (1): 3-17.
- Aspinall, Edward and Mada Sukmajati. 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov.
- Berenschot, Ward and Edward Aspinall. 2013. *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bevis, Gwendolyn. 2004. "Civil Society Groups and Political Parties: Supporting Constructive Relationships". *Occasional Papers Series*, USAID.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, Jakarta.
- Center for Political Study (Puskapol UI). 2010. "Representation of Women in Political Parties and Election Regulations" December.
- Chan, Andrian. 1997. "In Search of Civil Society and China." *Journal of Contemporary Asia* 27 (2): 242-251.
- Cohen, Jean L. and Andrew Arato. 2003. "Civil Society and Political Theory.". In *The Civil Society: Reader*, edited by Virginia A. Hodgkinson and Michael W. Foley. New England: University of New England Press.
- Cresswell, John. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publication.
- Fuad, A. 2015. "Fusi Partai-partai Islam Menjadi PPP pada Masa Awal Orde Baru (1971-1973)." *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

- Jppn.com. 2019. "Pengin Tahu Berapa Kader Fatayat NU Jadi Anggota DPR?" Retrieved 12 August 2021 (<https://www.jpnn.com/news/pengin-tahu-berapa-kader-fatayat-nu-jadi-anggota-dpr-2019-2024>).
- Kompas.com. 2019. "Hasil Lengkap Perolehan Kursi DPR". Retrieved 12 August 2021 (<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap-perolehan-kursi-dpr-2019-2024?page=all>).
- Kurnia, Jajang. 2011. "Peran Pimpinan Pusat Aisyiyah dalam Pemberdayaan Politik Perempuan". *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lay, Cornelis. 2017. "Tautan Politik antara Pengrajin Batik, Parlemen, dan Masyarakat Sipil di Yogyakarta." *Prisma* 36 (1).
- Mahsun, Muhammad, et al. 2019. "Female Candidates, Islamic Women's Organisations, and Clientelism in the 2019 Indonesian Elections." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40 (2021):73-92.
- Mietzner, Marcus. 2013. "Fighting the Hellhounds: Prodemocracy Activists and Party Politics in Post-Suharto Indonesia". *Journal of Contemporary Asia* 43 (1).
- Morlino, Leonardo. 1998. *Democracy Between Consolidation and Crisis: Parties, Groups, Citizens in Southern Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- Perdana, Aditya. 2009. *Civil Society dan Partai Politik dalam Demokratisasi di Indonesia*. Percik- Seminar Nasional di Salatiga.
- Perdana, Aditya. 2017. "The Relationship of Civil Society Organizations (CSOs) and Political Parties in Post-Suharto Indonesia: A Women's CSO Perspective." *Dissertation*, University of Hamburg.
- Puskapol UI, "Analisa Perolehan Kursi Pemilu DPR dan DPD RI tahun 2019: Kekerabatan dan Klientalisme dalam Keterwakilan Politik".
- Schroder, Peter. 2009. *Strategi Politik*. Jakarta: Friederich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit.
- Swarizona, Silkania. 2021. "Keterlibatan Jaringan Muslimat NU dalam Memenangkan Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018". *Literatus* 3(1): 1-9.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Varshney, Ashutosh. 1997. "Postmodernism, Civic Engagement, and Ethnic Conflicts." *Comparative Politics* 30(1): 1-20.

- Wardani, Sri Budi Eko and Valina Sinka Subekti. 2021. "Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40(1):28-49.
- Wijaksana, M. B. (ed). 2013. "Model Perempuan untuk Politik: Sebuah Pandangan Tentang Partisipasi Perempuan dalam Politik". In *Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif*, edited by Sali Susiana. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Yulianto. 2018. "Gerakan PKB di Pilgub Jateng Mengejutkan." *Nasional*, 2 Juli.
- Wawancara dengan Margaret Aliyatul Maimunah, Sekjen Fatayat NU, Jakarta, 15 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Anggia Ermarini, Ketua Umum Fatayat NU, Jakarta, 11 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Hassanudin Wahid, Sekretaris Jendral DPP PKB, Jakarta, 12 Agustus 2021.